

Citra Polisi Abad Ke - 21

Merenungi Mitos dan Wujud Profesionalisme Polri

Oleh Drs. M. Arief Pranoto *)

Pengantar

Semenjak berintegrasi dengan militer (1967 - 1999) profesionalisme Polri yang dirindukan berbagai kalangan terutama rakyat ternyata cuma mitos belaka. Apabila ditanyakan kenapa demikian maka jawaban utamanya karena “kendala struktural dan kultural” dalam sistem ketatanegaraan, sehingga membuat Polri lambat berkembangnya terutama untuk meningkatkan profesionalitasnya. Akibatnya berbagai kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas pokok yang dicanangkan tiap pimpinan di masing-masing era untuk mewujudkan citra Polri yang konstruktif dalam masyarakat selama ini, kalau tidak dikatakan jalan di tempat, barangkali merayap!

Secara phisik bahwa profesionalisme bidang apapun akan terkait dengan ilmu, teknologi, etika profesi, sarana dan prasarana pelaksanaan tugas, motivasi, dan terutama kualitas sumber daya manusianya (SDM). Demikian juga dengan Polri. Selanjutnya bila bicara ilmu dan kualitas SDM akan dipertanyakan bagaimana sistem rekrutmen dan

pendidikannya; berbicara teknologi dan sarana pelaksanaan tugas akan ditanya bagaimana dukungan anggarannya; berbicara motivasi akan dipertanyakan bagaimana kesejahteraan anggotanya; bicara sikap prilaku anggota akan ditanya bagaimana pengalaman dan aplikasi etika profesinya dan seterusnya.

Kendala struktural dan kultural yang dikatakan di muka tadi bukanlah alasan klasik tetapi justru merupakan titik awal dari berbagai kendala dalam rangka memenuhi syarat phisik bagi profesionalismenya. Pengalaman masa lalu dengan berbagai bentuk penyeragaman secara militer dalam kehidupan Polri menimbulkan berbagai penyimpangan pada kiprah pengabdianya. Sebagai contoh ketika Polri memasuki dimensi politik maka perannya sebagai pembimbing, pelayan dan pengayom masyarakat terpaksa harus ditanggalkan diganti sebagai alat penguasa akibat ketidakmandiriannya, atau ketika Polri harus ramah dengan 3S-nya untuk membimbing dan mengayomi masyarakat maka yang muncul adalah sikap kaku dengan gaya komando kemiliter-militeran, atau ketika Polri harus

*) Penulis adalah anggota Polri berpangkat Asisten Superintendent, Kabag Jianma Lantas, Polda Sumbar

melayani masyarakat dengan santun maka yang muncul adalah berbagai pungutan liar karena gajinya kecil, atau ketika kebijakan strategis pimpinan diturunkan pada satuan kewilayahan guna membangun citranya maka yang muncul adalah slogan-slogan dengan diikuti "prasasti" kebijakan pimpinan di dinding-dinding kesatuan. Persoalannya sekarang, bagaimana wujud profesionalisme Polri pada orde reformasi dan orde berikutnya di abad ke-21?

Persepsi Soal Profesionalisme

Beragam makna dan definisi tentang profesionalisme Polri disampaikan banyak kalangan (baca : pakar). Misalnya pendapat bahwa profesionalisme ialah ketika Polri mampu memanfaatkan teknologi lain dalam mengungkap suatu perkara, atau profesionalisme Polri dimaksudkan dengan kemampuan dan ketrampilan/kemahiran untuk melaksanakan pedoman moral dalam bentuk tata laku dan tata tindak (Awaloedin Djamin, 1995) dan banyak lagi yang lainnya.

Berbagai pendapat soal profesionalisme Polri tersebut adalah benar adanya, oleh karena pendapat tersebut berangkat dari masing-masing disiplin ilmu, pengalaman atau nilai-nilai yang dianut seseorang (baca : pakar). Akan tetapi dengan segala kerendahan hati kita mesti bertanya, apakah selama ini

anggota Polri memiliki persepsi sama serta memahami dengan jelas soal profesionalisme Polri yang diharapkan?

Pertanyaan tersebut tidak untuk dijawab agar tulisan ini bisa dilanjutkan dengan satu catatan, bahwa makna dan definisi profesionalisme Polri yang diketengahkan berbagai kalangan tadi berpijak dari pemikiran "tidak sederhana" tetapi akhirnya berubah menjadi hal yang "sederhana". Artinya bahwa terminologi profesionalisme Polri sebelumnya melalui proses pemikiran, pengalaman, rujukan para pakar, perdebatan atau diskusi yang mungkin memakan waktu; tetapi harus pula diakui bahwa hasil yang diperoleh dalam praktek pengabdian Polri dimasa lalu adalah sederhana, yakni profesionalisme hanya slogan semata!

Dari uraian di atas benang merah yang bisa digarisbawahi adalah bahwa perjalanan kerangka (filosofi) berpikir di Polri adalah dari "tidak sederhana" menjadi "sederhana". Misalnya banyak pimpinan mengatakan bahwa Polri kurang personel tetapi masih ada bahkan banyak anggota Polri yang kerjanya duduk-duduk menganggur di kantor; banyak pakar mengatakan bahwa gaji Polri relatif kecil tetapi banyak pula anggota Polri yang memakai handphone; banyak pendapat mengatakan bahwa Polri harus meninggalkan gaya meliternya tetapi masih banyak pos-pos monyet di kewilayahan yang belum

dibongkar; banyak kalangan mengatakan bahwa Polri kekurangan anggaran dan sarana pelaksanaan tugas tetapi penyelesaian perkaranya sangat “mencengangkan” dan seterusnya.

Dalam konteks profesionalisme Polri ini penulis mencoba mengetengahkan filosofi berpikir dari “sederhana” menjadi “tidak sederhana”. Hal ini dilatar-belakangi suatu renungan bahwa Allah menciptakan manusia secara sederhana yaitu dari tanah yang kemudian ditiupkan roh, hasilnya sungguh-sungguh sederhana ! Manusia bisa menciptakan pesawat terbang , komputer, pergi ke bulan dan berbagai keajaiban teknologi lainnya, serta kadang-kadang manusia “lupa” yaitu menjadi provokator yang mengakibatkan pertumpahan darah antara sesama, antar saudara, tidak sederhana, kan ?

Filosofi berpikir “sederhana” menjadi “tidak sederhana” juga didasari atas pengalaman, disiplin ilmu (ilmu kepolisian adalah ilmu yang inter disipliner), rujukan para pakar, sistem nilai yang dianut dan sebagainya. Hakekat profesionalisme Polri ialah kesempurnaan dalam tugas. Dengan kalimat sederhananya, jika sersan A tugasnya mengatur lalu-lintas maka hasilnya adalah kenyamanan pemakai jalan; bila si buser kerjanya menangkap maling maka hasilnya banyak maling tertangkap dan rakyat aman. Dalam peraktek di lapangan sering dijumpai

banyak anggota Polri disibukkan oleh kegiatan-kegiatan menyita segala sumberdaya tetapi bukan tugas pokoknya, dan kegiatan tersebut dikemas dalam terminologi “semi dinas” , itu perintah komandan !

Selanjutnya soal kesempurnaan tugas atau kesempurnaan pekerjaan bagi anggota Polri sangat terkait dengan karakter pekerjaan, tantangan, adat istiadat serta berbagai hal lainnya di suatu daerah. Ini berarti bawah profesionalitas polisi tergantung dinamisasi masyarakat (Satjipto Raharjo, 1999). Misalnya masyarakat menginginkan dihapuskan segala bentuk perjudian dan persundelan (baca : penyakit masyarakat) maka profesionalisme Polri adalah sejumlah Polri bisa menuntaskan penyakit masyarakat tersebut.

Dengan demikian operasi kepolisian terpusat untuk masa-masa mendatang mungkin sudah tidak relevan lagi kecuali operasi-operasi kemanusiaan seperti pengamanan lebaran, tahun baru, natal dan operasi kepolisian skope nasional yaitu mantap brata, dengan catatan khusus bahwa peningkatan operasi mandiri kewilayahan harus berdasarkan prioritas atas eskalasi tuntutan masyarakat di daerah.

Sebenarnya polisi itu tak bisa menentukan profesional atau tidak dirinya sendiri karena hal itu tergantung

tuntutan dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa profesionalisme Polri di tiap-tiap daerah akan berbeda oleh sebab tergantung dari sejauhmana polisi tersebut memenuhi harapan masyarakat. Contoh profesionalisme polisi di Gunung Kidul akan berbeda dengan profesionalitas polisi di Jakarta, Medan, Irian Jaya atau di Sungai Darah Kabupaten Sijunjung.

Polri Abad ke - 21

Berbagai konsep dan pemikiran alternatif tentang format Polri masa depan sedang digodog pada tingkat pusat, seperti perubahan sistem, struktur, pola dan sebagainya dengan suatu niat luhur agar kiprah Polri mampu menjawab tuntutan masyarakat orde reformasi dan orde berikutnya. Akan tetapi perlu digaris bawahi oleh para pengambil keputusan di republik ini, bahwa polisi adalah perangkat hukum bukan perangkat (kebijakan) eksekutif yang bisa di bubarkan dengan hak prerogatif Presiden, karena sebagai perangkat hukum keberadaannya dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dan ingat-ingat (Tiing!!) bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstat*).

Selanjutnya bila ada pendapat untuk memasukan Polri menjadi bagian dari eksekutif ——— untuk tingkat daerah di bawah Gubernur ——— hal tersebut

seperti mengulang” kebodohan masa lalu” oleh karena pengalaman di era orde baru menyatakan bahwa kiprah Polri sering dijadikan alat kepentingan penguasa bukan kepentingan hukum atau masyarakat banyak; adanya gagasan bahwa Kapolda dipilih oleh DPR barang kali sekedar “lelucon politik” saja, karena jika hal itu terealisasi maka kita seolah-olah hidup dalam suatu republik “ketoprak” yang Kapoldanya berasal dari Organda, Ninik Mamak atau mungkin Koramil; tergantung pilihan DPR setempat !

Banyak pihak mengatakan bahwa efektivitas Polri terasakan pada masa orde lama (1946-1965) sebelum disusupi unsur PKI. Secara umum keefektifan Polri pada saat itu terlihat dari stukturanya yang mandiri di bawah Presiden sebagai lembaga non departemen, sehingga pengembangan kekuatannya dapat disesuaikan dengan kehendak rakyat atas dasar kebutuhan rasa aman rakyat.

Dengan demikian perlu segera dilaksanakan seminar, diskusi atau yang lainnya oleh para pelaku sejarah orde lama baik itu mantan pejabat, tokoh masyarakat, cendekiawan dan lain-lainnya terutama yang memahami kristalisasi profesionalisme Polri pada tahun 1946 - 1965. Selanjutnya hasil dari diskusi atau seminar tadi diselaraskan dengan tuntutan rakyat era reformasi. Hal ini dirasakan di samping biayanya sangat

mahal juga proses sosialisasi kepada anggota dan masyarakat akan memakan waktu yang relatif lama, terutama efektivitasnya masih perlu dikaji secara cermat dan mendalam.

Penutup

Pada akhir tulisan ini terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan learning point sekaligus kontribusi acuan guna membangun citra Polri yang positif di abad ke-21, antara lain : (1) Bahwa profesionalisme Polri harus dirumuskan secara sederhana dan jelas serta dapat dipahami, dimengerti dan mudah diinternalisasikan kepada anggota disemua sektor dan strata kepangkatan sehingga menjadi dorongan motivasi disetiap anggota untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya; (2) Profesionalisme Polri di lapangan ditentukan oleh sejauh mana anggota

Polri memenuhi harapan masyarakatnya; (3) Bahwa perubahan sistem dan pola di tubuh Polri belum menjamin efektivitas kiprahnya sehingga yang dibutuhkan ialah penyempurnaan pola dan sistem yang sifatnya berkelanjutan; (4) Bahwa Polri adalah perangkat hukum dalam negara yang berdasar atas hukum, dengan demikian strukturnya dalam ketatanegaraan mutlak harus di luar (tidak menjadi bagian) dari eksekutif.

Artikel sederhana ini tidaklah memiliki kebenaran dan kebenaran mutlak, semata-mata hanyalah kontribusi penulis kepada Polri sebagai sumber pengabdian yang tak pernah kering. Akhirnya semoga format Polri di Era Reformasi ini paralel dengan tuntutan dan harapan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di republik tercinta ini. Selamat datang polisi rakyat, selamat datang Polri masa depan!



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KERJA SAMA (STIEKERS)

YAYASAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
Jl. Parangtritis KM. 3 Yogyakarta, Telp. 371087, 371088, Fax. (0274) 372911
Web Site <http://www.stiekers.edu>, e-mail : info@stiekers.edu, stiekers@idola.net.id

Mengucapkan Selamat Kepada :

Bapak Brigjen Pol. Drs. Logan Siagian
sebagai KAPOLDA DIY

Pimpinan : 1. Drs. Murthono Reksojoyo, MM (Ketua STIEKERS)
2. Drs. Sarwoko, M.Si (Puket I STIEKERS)

3. Dra. Yati Suhartini, MA (Puket II STIEKERS)
4. Sungkono, SE., AKT (Puket III STIEKERS)